— L E M B A G A — KEPRESIDENAN

Sejarah dan Dinamika dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

— ANDRYAN, S.H., M.H. —

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASKAN UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Andryan, S.H., M.H.

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

SetaraPress

2020

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penulis:

Andryan, S.H., M.H.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Juli 2020

ISBN : 978-602-6344-98-4

Diterbitkan bersama oleh:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Penerbitan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Andryan

Lembaga Kepresidenan: Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia/
Penyusun, Andryan - Cet. 1 - Malang: Setara Press, 2020

xii + 114 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

1. Kekuasaan Eksekutif—Presiden

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

352.23

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Guru yang telah memberi bimbingan dan nasihat,
Dari murid yang mempersembahkan buku ini untuk guru:
Yang Terpelajar dalam Usia 90 Tahun

Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.

Pengantar Penulis ...

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan buku *Lembaga Kepresidenan: Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dapat penulis selesaikan. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi Besar Muhammad Saw, peran besar beliau dalam mengangkat derajat manusia menuju alam terang benderang berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Lembaga Kepresidenan (*Presidential institution*) di Indonesia dapat disandingkan dengan lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*). Sedangkan, dalam bahasa asing untuk lingkungan jabatan digunakan istilah *Presidency*, dan sebagai pejabat digunakan istilah *President*. Jabatan presiden dikenal di Eropa ketika Prancis pada era Republik Kedua Prancis (1848-1851) menunjuk Louis Napoleon Bonaparte sebagai Presiden. Namun, setahun kemudian diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852) hingga Prancis ditaklukkan Jerman (1879) dan kemudian kembali menjadi Lembaga Kepresidenan pada era Republik Ketiga Prancis (1875-1940). Lembaga Kepresidenan juga secara resmi dikenal oleh masyarakat Internasional ketika Amerika memilih George Washington sebagai Presiden AS 1789 sampai 1797.

Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, Lembaga Kepresidenan menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Lembaga Kepresidenan lazim disebut sebagai masa “*executive heavy*”. Setelah amandemen atas Undang-undang Dasar Tahun 1945, mulai terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran kekuasaan eksekutif yang “*executive heavy*” menjadi “*legislative heavy*”.

Kedudukan, tugas, dan wewenangnya, Lembaga Kepresidenan dipimpin oleh seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden. Pada masa sesudah amandemen UUD 1945, terdapat perbedaan kedudukannya (dalam hal ini kedudukan Presiden), Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap Lembaga Kepresidenan, tidak hanya jumlah pasal maupun kekuasaannya. UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada Lembaga Kepresidenan, baik dalam kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan), legislatif (kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan), serta yustisial (kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti, dan abolisi).

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan pengalaman dari penulis. Oleh karenanya, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun, guna penyempurnaan buku ini ke arah yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap buku yang sangat sederhana ini kiranya dapat memberikan nilai manfaat bagi para pembaca.

Medan, Mei 2020

Penulis

Pengantar Penerbit ...

Pada hakikatnya, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses penentuan kepemimpinan nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering berubah-ubah dari masa ke masa, sedangkan pengaturan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang secara bersama-sama disebut sebagai Lembaga Kepresidenan Indonesia diatur di dalam UUD 1945. Kedudukan lembaga ini sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Sejarah panjang ini dimulai sejak ditentukannya konstitusi negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan naskah proklamasi, yang di dalamnya juga mengatur tentang kepemimpinan nasional.

Sebagaimana diakui oleh penulis buku ini, bahwa pengaturan tentang kelembagaan kepresidenan tidak diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang melainkan hanya batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, upaya untuk mengatur lembaga kepresidenan dalam sebuah undang-undang sudah dilakukan sejak tahun 2001 dan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Upaya tersebut berupa

Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan yang sudah “melewati” beberapa Presiden, mulai dari KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Dan, biasanya, kembali muncul tatkala menjelang Pemilihan Umum dan tenggelam tiba-tiba ketika proses Pemilu sudah selesai. Salah satu alasan tidak segera disahkannya RUU ini karena masih adanya tarik ulur antara Pemerintah dan DPR yang masing-masing mengusulkan draf RUU.

Pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan –melalui UU- sesungguhnya dapat dimaknai sebagai “angin segar” dalam membangun kesatuan antara Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya termasuk pembantu presiden yang dalam hal ini adalah menteri-menteri negara. Hal ini penting untuk memastikan ruang lingkup dalam pengaturan tugas, wewenang, serta hubungannya mencakup seluruh bagian dari lembaga kepresidenan. Adanya pengaturan tentang lembaga kepresidenan ini sesungguhnya juga berguna untuk mengelaborasi lebih jauh batas-batas tugas pokok dan fungsi Presiden yang diberikan oleh UUD 1945.

Buku yang ditulis oleh Mas Andryan ini hendak mengupas tentang sejarah dan dinamika perkembangan lembaga kepresidenan dalam ketatanegaraan Indonesia. Uraian sejarah dan dinamika perkembangan ini ditulis secara sistematis dalam enam bagian, yaitu Lembaga Kepresidenan di Indonesia (Bagian 1), Jabatan Presiden (Bagian 2), Pengisian Jabatan Presiden (Bagian 3), Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 (Bagian 4), Pemberhentian Presiden (Bagian 5), dan Lembaga Penasihat Presiden (Bagian 6). Pemilihan enam bagian ini bukan tanpa alasan. Penulis sepertinya mengikuti alur dan sistematika pembahasan yang ia berikan dalam perkuliahan ketika mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dengan terbitnya buku ini, redaksi Setara Press (Intrans Publishing Group) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah mempercayakan publikasi dan penerbitan buku ini kepada penerbit kami. Semoga buku ini memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di tanah air.

Mari, rebut perubahan dengan membaca!

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis __ vi

Pengantar Penerbit __ viii

Bagian 1. Lembaga Kepresidenan __ 1

- A. Sejarah Lembaga Kepresidenan __ 1
- B. Dinamika Lembaga Kepresidenan __ 6
- C. Sistem Pemerintahan di Indonesia __ 9

Bagian 2. Jabatan Presiden __ 19

- A. Persyaratan Presiden __ 19
- B. Masa Jabatan Presiden __ 24
- C. Presiden Berhalangan __ 25
- D. Pertanggungjawaban Presiden __ 30

Bagian 3. Pengisian Jabatan Presiden __ 33

- A. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) __ 35
- B. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) __ 41
- C. Masa Demokrasi Pancasila (1966-1998) __ 42
- D. Masa Demokrasi Langsung (1998-Saat Ini) __ 46

Bagian 4. Kekuasaan Presiden __ 65

- A. Kekuasaan dalam Bidang Pemerintahan __ 66
- B. Kekuasaan dalam Bidang Legislasi __ 71

- C. Kekuasaan dalam Bidang Yustisial __ 76
 - D. Kekuasaan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan __ 79
 - E. Kekuasaan dalam Bidang Luar Negeri __ 82
-

Bagian 5. Pemberhentian Presiden __ 84

- A. *Impeachment* Presiden __ 87
 - B. Mekanisme *Impeachment* di Mahkamah Konstitusi __ 89
-

Bagian 6. Lembaga Penasihat Presiden __ 95

- A. Sejarah Penasihat Presiden Indonesia __ 95
 - B. Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung __ 100
 - C. Peran dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam UUD 1945 __ 102
-

Daftar Pustaka __ 108

Tentang Penulis __ 113